

PERAN STRATEGIS DAN PENTINGNYA RPHJP dalam Pengelolaan Hutan dan Partisipasi Masyarakat

ARTIKEL LAINNYA

UNIVERSITAS OTTOW GEISSLER PAPUA DAN FORCLIME Siapkan Rencana Kegiatan Bersama Tahun 2023

PEMKAB TAMBRAUW KOORDINASIKAN RENCANA KERJA Bersama Mitra Pembangunan

FORCLIME SINERGIKAN RENCANA PENDAMPINGAN di Kampung Dukungan Bersama BUKSDA Papua

Editorial

Sebagai pengelola hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hutan dan kelestariannya. Untuk melakukan kegiatan, setiap KPH harus menyusun rencana pengelolaan untuk seluruh wilayah kerjanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sebagai rencana kerja strategis. Namun, tidak semua KPH mampu menyusun RPHJP secara mandiri karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknis. Oleh karena itu, bimbingan teknis (*coaching*) bagi KPH dalam menyusun RPHJP sangat diperlukan.

Proses *coaching* ini membantu KPH untuk mengembangkan kapasitas SDM dan organisasinya agar siap menjadi pengelola hutan secara profesional dan terpercaya. Dalam proses pendampingan, KPH mendapatkan bimbingan teknis dan pengembangan kapasitas SDM KPH dalam menyusun RPHJP. Selain itu, *coaching* ini juga membantu KPH dalam memahami peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan hutan serta mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Sampai tahun 2022, dari 34 provinsi di Indonesia, ada 549 KPH. Namun baru ada 390 KPH yang sudah memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disahkan, yakni: 234 KPHP, dan 156 KPHL.

Di Provinsi Papua Barat, seluruh kawasan hutan telah ditetapkan ulang berdasarkan SK. Menteri LHK Nomor SK.113/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2022 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Papua Barat, dimana kelembagaan CDK akan dilebur menjadi unit-unit KPH melalui penyesuaian rancang bangun KPH yang baru, dengan jumlah keseluruhan ada 14 unit KPH, terdiri atas 4 unit KPHL dan 10 unit KPHP. Pasca pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (UU RI No.29/2022 tanggal 8 Desember 2022), maka jumlah KPH berubah menjadi 7 unit KPH di Provinsi Papua Barat dan 7 unit KPH di Provinsi Papua Barat Daya.

FORCLIME mendukung Dinas Kehutanan Papua Barat mengadakan bimbingan teknis (*coaching clinic*) bagi seluruh KPH di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Pelaksanaan *coaching clinic* ini merupakan kolaborasi dari Dinas Kehutanan Papua Barat, Fakultas Kehutanan Universitas Papua dan FORCLIME. Sehingga masing-masing pihak berkontribusi terhadap penyelenggaraan pembinaan teknis ini.

Melalui pengembangan kapasitas SDM di unit pengelolaan hutan atau KPH, diharapkan pengelolaan hutan dilaksanakan secara profesional sehingga pada akhirnya pengelolaan hutan secara lestari dapat tercapai.

Mohammad Sidiq

Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Peran Strategis dan Pentingnya RPHJP dalam Pengelolaan Hutan dan Partisipasi Masyarakat

Pembelajaran dari pendampingan proses penyusunan RPHJP bagi KPH di Provinsi Papua Barat

Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat

Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Tugas menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) adalah tugas penting bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat provinsi. KPH memainkan peran penting sebagai tempat interaksi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks kebijakan. Sebagai unit pelaksana teknis di tingkat provinsi, KPH memainkan peran penting dalam proses penyusunan RPHJP, yang merupakan kebijakan pusat yang harus diimplementasikan oleh KPH di tingkat daerah.

RPHJP memiliki nilai-nilai penting bagi KPH. Pertama, RPHJP memungkinkan KPH untuk merumuskan rencana pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian sumber daya alam hutan. KPH harus memastikan bahwa kegiatan usaha pemanfaatan hutan dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan dalam jangka panjang.

Kedua, RPHJP memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. KPH bertanggung jawab dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat

dan dapat memfasilitasi proses penerbitan izin usaha pemanfaatan hutan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pengambilan keputusan.

Terakhir, RPHJP memiliki nilai penting dalam perlindungan dan pengelolaan hutan Indonesia. KPH memainkan peran penting dalam pengelolaan dan perlindungan hutan Indonesia. Dalam hal ini, KPH harus memastikan bahwa RPHJP yang disusun sesuai dengan kondisi lingkungan hidup dan masyarakat setempat agar keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian sumber daya alam hutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tugas menyusun RPHJP sangat strategis dan memiliki nilai-nilai penting bagi KPH. KPH harus mengerjakannya dengan baik dan mandiri agar dapat memberikan manfaat bagi lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian sumber daya alam hutan.

2



Coaching Clinic Penyusunan RPHJP KPH di Provinsi Papua Barat.

Proses *Coaching* RPHJP bagi KPH di Papua Barat

FORCLIME di Provinsi Papua Barat (kini menjadi Papua Barat Daya) memiliki dua KPH dampingan, yaitu KPH Sorong Selatan dan KPH Tambrauw. Seperti halnya dengan KPH di seluruh Indonesia, kedua KPH tersebut wajib menyusun dan menilai Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) melalui aplikasi Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP), sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Untuk mendukung kapasitas organisasi KPH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, FORCLIME memberikan dukungan teknis melalui kegiatan Bimbingan Teknis (*Coaching*) Penyusunan RPHJP.

Kami ingin berbagi pengalaman kami dalam proses *coaching* RPHJP bagi kedua unit KPH di Papua Barat, yaitu KPH Sorong Selatan dan KPH Tambrauw. Proses *coaching* RPHJP ini sangat penting bagi kedua KPH untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam menyusun RPHJP yang baik dan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup serta masyarakat setempat. Menurut para pihak yang terlibat dalam proses *coaching* KPH, dukungan teknis dari FORCLIME sangat membantu KPH, karena melalui proses ini memberikan bimbingan teknis yang terstruktur dan praktis untuk membantu KPH dalam menyusun RPHJP mereka.

Di Papua Barat, proses *coaching* RPHJP KPH dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama adalah dukungan teknis langsung dari tenaga pendamping UPT KLHK yang bekerja bersama personel KPH. Pendekatan kedua adalah dukungan teknis dari perguruan tinggi setempat melalui pola kerja sama *local subsidy*

antara FORCLIME dan Universitas Papua (UNIPA). Dalam praktiknya, UNIPA juga melibatkan tenaga pendamping UPT KLHK yang bekerja bersama personel KPH. Selain itu, kegiatan magang FORCLIME juga melibatkan mahasiswa magang dalam kegiatan survei lapangan sekaligus mendukung kegiatan *coaching* RPHJP ini. Dengan cara ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi KPH dalam menyusun RPHJP yang baik dan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup serta masyarakat setempat.

Dalam proses *coaching* KPH, salah satu hal penting yang didorong adalah untuk mendapatkan data melalui survei biogeofisik, serta survei sosial-ekonomi dan budaya. KPH didampingi oleh tenaga ahli yang berasal dari berbagai lembaga, termasuk UPT KLHK terkait seperti Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), perguruan tinggi lokal, dan mitra pembangunan. Tenaga pendamping tersebut bekerja bersama dengan staf KPH dan bersama-sama membentuk Tim Penyusun RPHJP.

Proses *coaching* RPHJP bagi KPH dimulai dengan mengidentifikasi status dan kebutuhan yang dihadapi oleh KPH dalam menyusun RPHJP. Setelah itu, dilakukan beberapa tahapan inti dari kegiatan penyusunan RPHJP. Dari dua KPH yang didukung oleh FORCLIME, KPH Sorong Selatan perlu merevisi RPHJP yang dimilikinya agar sesuai dengan kebijakan dan peraturan terbaru, seperti Peraturan Menteri LHK No P.08 tahun 2021. Sementara itu, KPH Tambrauw yang belum memiliki RPHJP sebelumnya perlu menyusunnya dari awal dengan dukungan dari para ahli dan tenaga pendamping.



Kiri atas: Pertemuan teknis persiapan inventarisasi Biogeofisik di KPH Sorong Selatan yang dipandu oleh BPKHTL Wilayah XVII Manokwari. **Kanan atas:** Pembekalan inventarisasi Biogeofisik dan Sosial Ekonomi. **Kiri bawah:** Wawancara masyarakat Kampung Mate Distrik Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan untuk inventarisasi Sosial, Ekonomi dan Budaya. **Kanan bawah:** Analisis Spasial Blok untuk Tata Hutan di KPH Sorong Selatan yang dipandu oleh BPKHTL Wilayah XVII Manokwari.

Untuk memulai tahapan penyusunan RPHJP, KPH di Papua Barat didampingi oleh tenaga ahli dari UPT KLHK dan perguruan tinggi setempat dalam pendekatan dukungan teknis langsung. Tahapan ini dimulai dengan pengumpulan data baik data spasial maupun non-spasial seperti peta tutupan kawasan hutan, batas wilayah KPH, arahan pemanfaatan hutan, indikatif penghentian pemberian izin baru, perhutanan sosial, tanah objek reformasi agraria, data potensi hutan, sosial-ekonomi dan budaya, serta data pendukung lainnya. Selanjutnya, dilakukan analisis data KPH dan analisis tata hutan berdasarkan hasil survei lapangan. Setelah itu, KPH melakukan FGD untuk pengembangan program kerja dan konsultasi publik sebelum menginput seluruh data RPHJP ke dalam Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP). Kegiatan konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan masukan dari para pihak yang terkait dan mensosialisasikan rencana jangka panjang KPH.

Untuk mendukung penyusunan RPHJP KPH Tambrau, UNIPA melaksanakan proses bimbingan teknis melalui skema *Local Subsidy* (LS). Proses pendampingan RPHJP dimulai dengan tahapan *Workshop Coaching Clinic* yang bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada KPH Tambrau dalam menyusun RPHJP. Selain itu, beberapa KPH di wilayah Provinsi Papua Barat (termasuk yang baru dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat Daya) juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut.

Dalam proses tersebut, KPH dapat dukungan teknis dalam penyusunan RPHJP. KPH juga dapat pengetahuan dan keterampilan baru dalam penyusunan RPHJP melalui SI-RPHJP. Selain itu, KPH juga dapat meningkatkan kualitas RPHJP yang disusun sehingga memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian sumber daya alam hutan. Proses *coaching* ini juga bertujuan untuk membantu KPH dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan kapasitas serta kompetensi dalam menyusun RPHJP yang baik. Selain itu, melalui *coaching* RPHJP juga dapat meningkatkan pemahaman KPH dalam merencanakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga dapat tercipta hubungan yang baik antara KPH dan masyarakat setempat.

Upaya Menghadapi Tantangan dalam Program Pendampingan

Proses bimbingan teknis (*coaching*) RPHJP KPH memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi, **pertama** tantangan terbatasnya jumlah dan pemahaman SDM yang tersedia di KPH. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, *coaching* RPHJP KPH dilakukan agar mereka dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi KPH dengan baik. Namun, pemahaman teknis SDM KPH dalam menyusun rencana kerja terbatas, sehingga dapat mempengaruhi kualitas data dan perencanaan yang disusunnya.

Kedua, tantangan kebijakan dan keputusan Kepala KPH. Hal ini dapat mempengaruhi proses penyusunan RPHJP KPH, oleh karena itu, perlu pendampingan dalam merumuskan kebijakan dan program untuk mendukung tersusunnya RPHJP. Dalam upaya menghadapi tantangan ini, *coaching* RPHJP KPH dilakukan dengan mengoptimalkan kerja sama antara kepala KPH dan tim *coaching* sehingga dapat memastikan tersusunnya RPHJP yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan hidup serta masyarakat setempat.

Ketiga, tantangan keberlanjutan pelaksanaan program. Seringkali, KPH hanya mendapatkan porsi anggaran yang kecil, sehingga keberlanjutan program yang dilaksanakan menjadi sulit diwujudkan. Untuk mengatasi tantangan ini, proses *coaching* harus memastikan keberlanjutan program yang dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian hutan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dalam upaya ini, perlu dilakukan kolaborasi dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya yang ada.

“Saya merasa sangat terbantu dengan bimbingan coaching KPH ini. Sebagai SDM Kehutanan, saya mendapatkan tambahan keterampilan teknis dari para tim ahli, terutama dalam hal menganalisis data untuk menyusun program kerja yang efektif. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Kepala KPH. Namun saya yakin bahwa coaching ini akan menjadi kunci sukses dalam meningkatkan kinerja kami di kantor ini”, menurut Pak Anis, staf KPH Sorong Selatan yang saat ini bertugas di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.



Proses melakukan transek untuk Inventarisasi Biogeofisik di Kampung Mate Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan

Catatan Pembelajaran

Pembelajaran dari proses *coaching* RPHJP KPH sangat memberikan dampak positif. Dari proses *coaching* ini setidaknya menghasilkan beberapa hal penting seperti peningkatan kapasitas dan kompetensi KPH, penggunaan data yang akurat untuk perencanaan, meningkatkan kerja sama antar instansi, meningkatkan partisipasi publik, dan selalu memperbarui diri dengan kebijakan terbaru. Secara garis besar, catatan pembelajaran dari proses *coaching* RPHJP di KPH Sorong Selatan dan KPH Tambrauw di Provinsi Papua Barat (saat ini Provinsi Papua Barat Daya) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi KPH dalam menyusun RPHJP yang baik dan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup serta masyarakat setempat. Dukungan teknis melalui kegiatan *coaching* RPHJP ini memberikan bimbingan teknis yang terstruktur dan praktis untuk membantu KPH dalam menyusun RPHJP mereka. Proses *coaching* ini juga dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda, yaitu dukungan teknis langsung dari tenaga pendamping UPT KLHK yang bekerja bersama personel KPH, dan dukungan teknis dari perguruan tinggi setempat melalui pola kerja sama *local subsidy* antara FORCLIME dan UNIPA.
2. Mendorong pengumpulan data melalui survei biogeofisik, serta survei sosial-ekonomi dan budaya. Proses *coaching* RPHJP bagi KPH didampingi oleh tenaga ahli yang berasal dari berbagai lembaga, termasuk UPT KLHK terkait seperti BPKHTL, perguruan tinggi lokal, dan mitra pembangunan. Proses ini memastikan bahwa RPHJP yang disusun KPH memiliki dasar yang kuat dan akurat dalam pengumpulan data, sehingga RPHJP dapat lebih tepat dalam merencanakan pengelolaan hutan di daerah tersebut.
3. Meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan RPHJP melalui kegiatan FGD dan konsultasi publik. Dalam kegiatan FGD, KPH dan

para ahli membahas pengembangan program kerja. Sementara, melalui konsultasi publik, KPH mensosialisasikan rencana jangka panjang mereka dan mendapatkan masukan dari para pihak yang terkait. Hal ini dapat meningkatkan kesepahaman dan dukungan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan di daerah tersebut.

4. Memastikan bahwa RPHJP yang disusun sesuai dengan kebijakan dan peraturan terbaru. Dua KPH yang didukung oleh FORCLIME, yaitu KPH Sorong Selatan dan KPH Tambrauw perlu merevisi ataupun menyusun RPHJP yang dimilikinya agar sesuai dengan kebijakan dan peraturan terbaru, seperti Peraturan Menteri LHK No P.08 tahun 2021. Proses *coaching* ini memastikan bahwa RPHJP yang disusun oleh KPH sesuai dengan kebijakan dan peraturan terbaru, sehingga pengelolaan hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial.



Wawancara masyarakat Kampung Wendi Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan untuk Inventarisasi Sosekbud.

Artikel lainnya

Universitas Ottow Geissler Papua dan FORCLIME Siapkan Rencana Kegiatan Bersama Tahun 2023

Sejak tahun 2021, FORCLIME telah bekerja sama dengan Universitas Ottow Geissler Papua (UOGP) untuk melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pengembangan Hutan Pendidikan Nyei Toro dan pembentukan Center of Excellence (CoE) untuk Sistem Informasi Geografis dan pemetaan. Dalam rangka melanjutkan kerja sama, FORCLIME melaksanakan pertemuan dengan UOGP pada tanggal 2 Februari 2023 di Kampus UOGP, Jayapura. Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan UOGP, Bapak Frank Leonardo Apituley, S.Hut., M.Si.

Pengembangan Hutan Pendidikan Nyei Toro sedang dalam tahap penyusunan rencana pengelolaan. Saat ini, UOGP menjalin kerja sama dengan Badan Riset Nasional Indonesia (BRIN) Manokwari untuk melaksanakan inventarisasi potensi biogeofisik sebagai data dasar dalam penyusunan dokumen rencana tersebut. Selain kegiatan tersebut, di tahun 2023 UOGP juga akan berkontribusi dalam program pemberdayaan masyarakat di Kampung Dosai dan Kampung



Tablasupa, yang merupakan kampung binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang juga didukung kegiatannya oleh FORCLIME.

“Kami berterima kasih karena di tahun ini Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Ilmu Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua bisa melaksanakan pengabdian masyarakat di kampung-kampung yang didukung oleh FORCLIME. Hal ini menjadi salah satu dari Tri Dharma perguruan tinggi”, kata Bapak Frank Leonardo.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Ruben Yogi**, Advisor Junior Bidang GIS dan Pemetaan Hutan
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Pemkab Tambrauw Koordinasikan Rencana Kerja Bersama Mitra Pembangunan

Melanjutkan penyusunan *Master Plan* Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw, Pemerintah Provinsi Kabupaten (Pemkab) Tambrauw menyelenggarakan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi Mitra Pembangunan Kabupaten Tambrauw. Mitra Pembangunan Kabupaten Tambrauw ini digawangi oleh Pemkab Tambrauw dan terdiri dari LSM, universitas, swasta, NGO, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Tambrauw. FORCLIME yang telah memulai aktivitas di Kabupaten Tambrauw sejak akhir 2021, turut menjadi bagian dalam Mitra Pembangunan Kabupaten Tambrauw tersebut.

Pertemuan ini dilaksanakan pada 2 Februari 2023 di Manokwari, Papua Barat dan dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tambrauw, Bapak Muosche Worja, S.IP., M.IP. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa program kerja para mitra akan menjadi masukan dalam penyusunan dokumen master plan, dan kegiatan sinkronisasi ini merupakan contoh kolaborasi dalam pembangunan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat.

Dalam pertemuan tersebut, 35 peserta mitra hadir dan memaparkan program kerja masing-masing yang akan dilaksanakan tahun 2023. FORCLIME turut menyampaikan kegiatan prioritas yang akan dilakukan, diantaranya adalah mendukung penyusunan rencana



pengelolaan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambrauw dan Cagar Alam Tambrauw, serta melanjutkan pendampingan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kampung Bikar dan Kampung Emaus dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Pertemuan ini menghasilkan matriks indikator Mitra Pembangunan Kabupaten Tambrauw yang akan diintegrasikan ke dalam dokumen master plan. Tim penulis selanjutnya akan melakukan finalisasi dokumen, dan penyerahan dokumen master plan dari tim penulis kepada Pemkab Tambrauw rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. *Master Plan* Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat ini akan menjadi bagian utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tambrauw 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Tambrauw.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
2. Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

FORCLIME Sinergikan Rencana Pendampingan di Kampung Dukungan Bersama BBKSDA Papua

Dalam rangka melanjutkan kegiatan pendampingan untuk Kelompok Pemberdayaan di Kampung Dosay dan Kampung Tablasupa, FORCLIME berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua untuk merencanakan program bersama di tahun 2023, terutama yang akan dilakukan di kedua kampung tersebut. Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Februari 2023 di Kantor BBKSDA Papua, dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz Bakry, S.Pi., M.Si selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha BBKSDA Papua.

Pertemuan diawali dengan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan bersama di tahun 2022. Beberapa kegiatan BBKSDA Papua yang didukung oleh FORCLIME adalah penyusunan dokumen Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) di Cagar Alam Cycloops dan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, pelaksanaan Lokakarya Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, pelaksanaan Lokakarya Perlindungan dan Pengamanan Kawasan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Dosay dan Kampung Tablasupa.



Di tahun 2023, kegiatan pemberdayaan di kedua kampung tersebut akan melibatkan Universitas Ottow Geissler Papua. Kegiatan pemberdayaan juga akan mengacu pada RPM Cagar Alam Cycloops.

“Dukungan FORCLIME di tahun 2022 berjalan sangat baik. Dampak dari pelaksanaan kegiatan, terutama terkait peningkatan kapasitas dan pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak, telah membantu BBKSDA Papua. Dengan keilmuan yang dimiliki oleh Universitas Ottow Geissler Papua, kerja-kerja pemberdayaan masyarakat akan dapat diperkuat”, kata Bapak Abdul Aziz Bakry.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Theodora F. Resubun, Advisor Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua
2. Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de



Bekerja sama dengan:

